

Kausalitas Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi pada 8 Kota di Indonesia

Agus Ainul Falah¹, Agus Suman²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: ainulfalah17@gmail.com¹

ABSTRAK

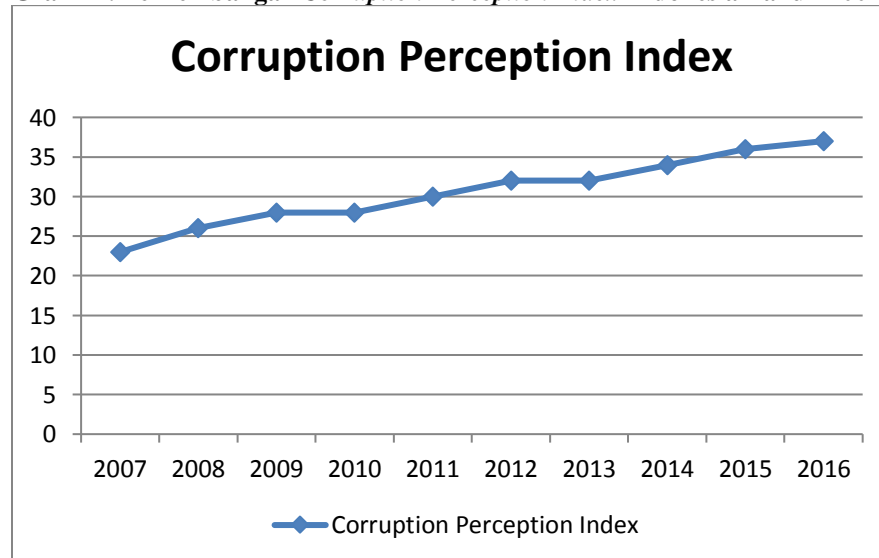
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi dan kausalitas antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada 8 Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis Uji Korelasi dan Uji Kausalitas Granger. Data yang digunakan ialah data panel yang terkait dengan indeks persepsi korupsi, jumlah penduduk miskin, dan produk domestik regional bruto perkapita atas dasar harga berlaku. Hasil penelitian menunjukkan (1) tingkat hubungan (korelasi) antara korupsi dan kemiskinan ialah rendah dan bersifat negatif, serta tidak ada hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan; (2) tingkat hubungan (korelasi) antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ialah rendah dan bersifat positif, serta tidak ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; (3) tingkat hubungan (korelasi) antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi ialah rendah dan bersifat positif, serta terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi atau korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Korupsi, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kenaikan, meski tidak terlalu optimis. Hal ini terafirmasi dalam laporan *Corruption Perception Index* (CPI) yang di setiap tahun dipublikasikan oleh Transparency International. Berdasarkan Transparency International, Indonesia pada tahun 2016 memperoleh skor 37 pada rentang 0 – 100, dimana Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara yang disurvei. Angka *Corruption Perception Index* digunakan oleh banyak negara sebagai salah satu tolak ukur situasi korupsi yang terjadi di negara tersebut. *Corruption Perception Index* (CPI) direpresentasikan dalam bentuk bobot skor ataupun angka dengan rentang 0 – 100. Dalam hal ini, skor 0 berarti negara tersebut direpresentasikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara tersebut sangat bersih dari tindak korupsi. Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa skor *corruption perception index* Indonesia cenderung mengalami peningkatan.

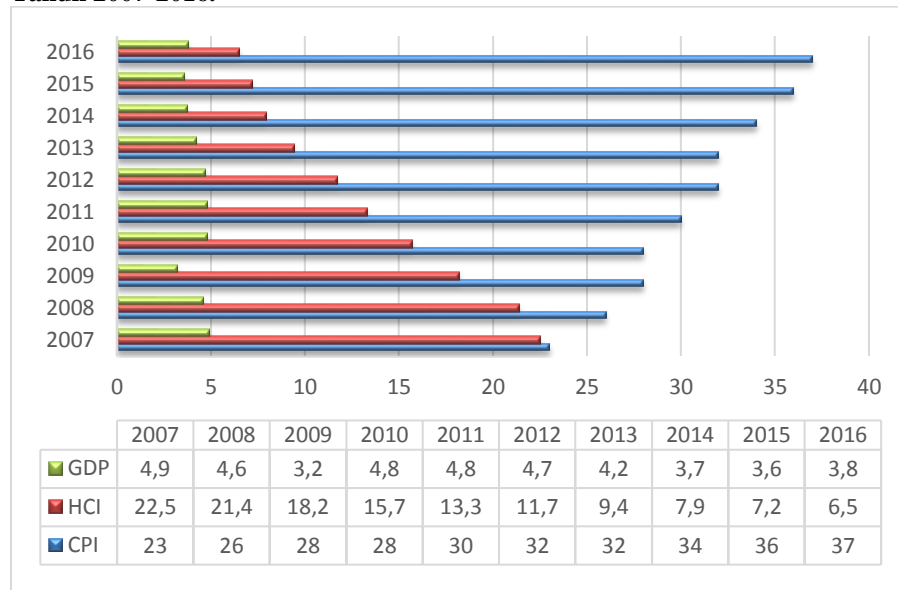
Grafik 1. Perkembangan *Corruption Perception Index* Indonesia Tahun 2007-2016.



Sumber: *Transparency International*, data diolah (2018).

Korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Artinya, peningkatan korupsi secara langsung akan mengurangi investasi perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusaknya kompetisi, inefisiensi, serta ketimpangan pendapatan, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di suatu wilayah. Permasalahan Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan belum mencapai hasil yang memuaskan dari beberapa pergantian masa pemerintahan sebelumnya hingga di penghujung masa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla ini. Ironisnya ialah dalam program-program pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan pada beberapa waktu justru terjadi tindak korupsi didalamnya.

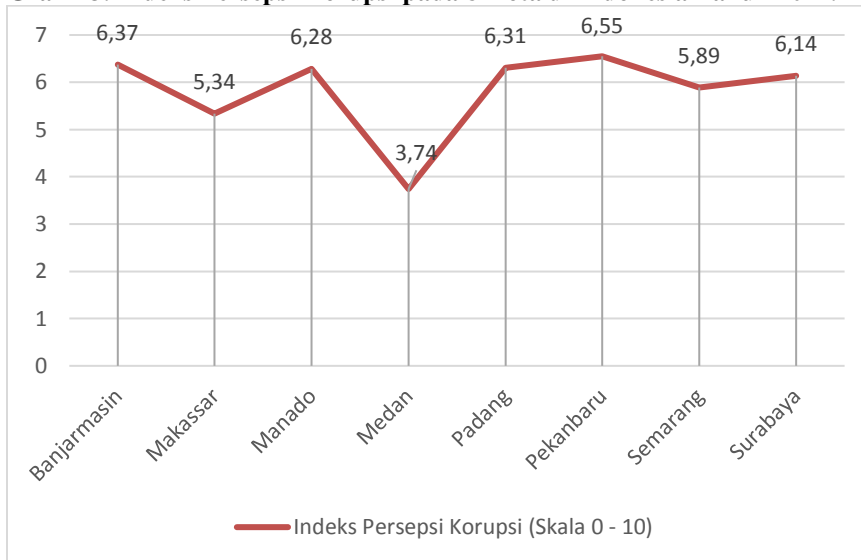
Grafik 2. Perkembangan *Corruption Perception Index*, *Head Count Index*, dan *GDP Percapita* Indonesia Tahun 2007-2016.



Sumber: *World Bank* dan *Transparency International*, data diolah (2018).

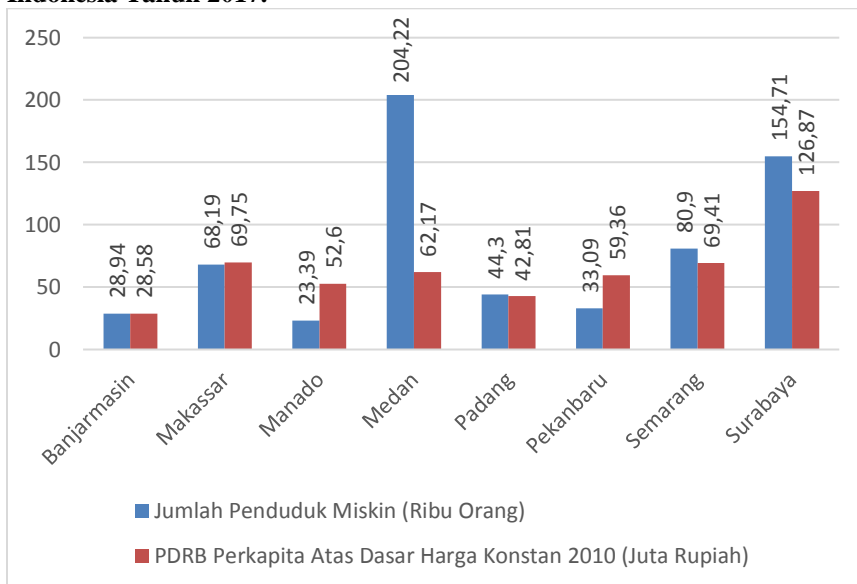
Kemiskinan berdasarkan grafik 2 dijelaskan bahwa mengalami penurunan secara terus-menerus. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi berdasarkan grafik diatas ialah bersifat fluktuatif, dimana terbagi menjadi 4 fase pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, ketika korupsi mengalami penurunan, maka kemiskinan juga akan mengalami penurunan serta berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal yang bertentangan ialah ketika korupsi dan kemiskinan mengalami penurunan, justru pertumbuhan ekonomi turut serta mengalami kecenderungan menurun.

Grafik 3. Indeks Persepsi Korupsi pada 8 Kota di Indonesia Tahun 2017.



Sumber: *Transparency International Indonesia*, data diolah (2018).

Grafik 4. Jumlah Penduduk Miskin dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada 8 Kota di Indonesia Tahun 2017.



Sumber: *Badan Pusat Statistik*, data diolah (2018).

Berdasarkan grafik 3 dijelaskan bahwa korupsi di Kota Medan paling tinggi dengan nilai indeks persepsi korupsi sebesar 3,74, sedangkan korupsi di Kota Pekanbaru paling rendah dengan nilai indeks persepsi korupsi sebesar 6,55. Grafik 3 juga menjelaskan bahwa rerata nilai indeks persepsi korupsi pada 8 Kota di Indonesia ialah sebesar 5,83, dimana hanya Kota Makassar dan Medan yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi dibawah rerata tersebut. Sementara itu, grafik 4 menjelaskan bahwa rerata jumlah penduduk miskin pada 8 kota di Indonesia ialah sebesar 79,72 ribu orang, dimana Kota Medan, Semarang, dan Surabaya memiliki jumlah penduduk miskin diatas rerata tersebut. Berdasarkan grafik 4 juga dijelaskan bahwa rerata PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 pada 8 kota di Indonesia ialah sebesar 63,94 juta rupiah, dimana Kota Makassar, Semarang, dan Surabaya memiliki PDRB perkapita diatas rerata tersebut.

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan melalui mekanisme *trickle down effect* (Deininger & Olinto, 2000). Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada kenyatannya masih menghasilkan realisasi tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 10,86 persen, dimana hal ini tidak sesuai target yang telah ditetapkan, yakni 9 – 10 persen (Badan Pusat Statistik, 2016). Dalam hal ini, evaluasi mengenai pola pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi isu penting dan menarik, misalnya *pro poor growth* (pertumbuhan ekonomi yang memihak terhadap kemiskinan) yang sejak beberapa tahun terakhir telah menjadi konsep penting, dimana pertumbuhan ekonomi global berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan kelompok miskin dan tidak ada tanda-tanda pelemahan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan (Dollar & Kraay, 2001). Dalam konteks konsep ini di Indonesia, Suhartini (2011) dalam Rumagit (2016) menjelaskan bahwa hasil penelitian *pro poor growth* di Indonesia ialah pada awal periode 2005 – 2006, pertumbuhan ekonomi bersifat anti *pro poor growth* yang berarti penduduk miskin tidak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pada akhir periode 2008 – 2009, pertumbuhan ekonomi telah bersifat *pro poor growth* yang berarti penduduk miskin merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada penduduk tidak miskin.

Menurut Chetwynd *et al.*, (2003) bahwa model ekonomi memberikan petunjuk bahwa korupsi akan berdampak langsung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan model pemerintahan memberi petunjuk bahwa korupsi akan mengurangi anggaran negara yang akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara dalam mereduksi korupsi. Dalam hal ini, kemampuan negara dalam mereduksi korupsi dapat dilihat berdasarkan kinerja pemerintahan, dimana *good governance* sebagai indikator utama dalam standar penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan. Menurut *World Bank* dalam Wahab (2002: 34) bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. (1) untuk mengetahui hubungan antara korupsi dengan kemiskinan pada 8 kota di Indonesia; (2) untuk mengetahui hubungan antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi pada 8 kota di Indonesia; (3) untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan korupsi pada 8 kota di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Lembaga *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Menurut *World Bank* (dalam Tanzi, 1998), korupsi ialah penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, melainkan juga terhadap keluarga, teman, partai politik, maupun kelompok tertentu dalam masyarakat. Pandangan ekonomi politik menjelaskan bahwa rente ialah bentuk kemudahan seseorang atau suatu bisnis dalam mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh sekelompok orang karena mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau *previllege* yang diberikan pemerintah atau publik (Hudiyanto, 2004: 21).

Kemiskinan

World Bank (2001) menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai suatu keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak, dimana penghasilan yang diperoleh ialah USD 1 per hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan ialah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Friedman (1979) dalam Franciari (2013) menjelaskan bahwa kemiskinan ialah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuatan sosial, meliputi asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan); sumber

keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai); organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama; jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna. Todaro & Smith (2011: 261-261) menjelaskan bahwa kemiskinan absolut dialami oleh penduduk yang hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum atau garis kemiskinan internasional, yakni USD 1 per hari dalam dollar paritas daya beli (PPP).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan karena pengaruh besarnya terhadap peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Tujuan utama perhitungan pertumbuhan ekonomi ialah ingin melihat apakah kondisi perekonomian membaik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2012: 1). Sementara itu, menurut Mankiw *et al.*, (2014: 7) bahwa pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan GDP riil suatu negara pada tahun tertentu yang menunjukkan naiknya pendapatan perkapita setiap orang dalam perekonomian dan dalam suatu negara pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB dalam tataran daerah maupun produk domestik bruto dalam tataran nasional berdasarkan harga yang berlaku maupun harga konstan.

Penelitian Terdahulu

Rahayu dan Widodo (2012) menggunakan basis data 9 Negara ASEAN selama periode 2005 – 2009 melalui indeks persepsi korupsi dan indeks pembangunan manusia, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap kemiskinan. Sementara itu, Negin *et al.* (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara korupsi dan kemiskinan. Franciari (2013) menggunakan basis data 38 kabupaten/kota di Negara Indonesia selama periode 2008 dan 2010 melalui indeks persepsi korupsi Indonesia dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, hasil analisis kausalitas dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan memiliki hubungan kausalitas satu arah, dimana kemiskinan menyebabkan korupsi.

Ajilore dan Elumilade (2007) menggunakan basis data Negara Nigeria selama periode 1970 – 2004 melalui tingkat aliran modal dan tingkat pertumbuhan GDP, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Farooq *et al.* (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Egunjobi (2013) menggunakan basis data Negara Nigeria selama periode 1980 – 2009 melalui tenaga kerja yang disuap dan indeks korupsi, serta GDP, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi.

Nyasha (2016) hasil penelitiannya dalam jangka panjang menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan hanya pada model 2, dimana variabel kemiskinan dijelaskan oleh angka kematin bayi per 1000. Sementara itu, Aimon (2012) menggunakan basis data Negara Indonesia selama periode 1980 – 2009 melalui persentase pertumbuhan ekonomi dan persentase tingkat kemiskinan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Odhiambo (2009) menggunakan basis data Negara Afrika Selatan selama periode 1960 – 2006 melalui GDP riil perkapita dan konsumsi perkapita, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dan kausalitas antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada 8 Kota di Indonesia. Dalam hal ini, objek penelitian dalam penelitian ini ialah Kota Banjarmasin, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Semarang, dan Kota Surabaya. Sementara itu, waktu yang digunakan dalam penelitian ini ialah tahun 2004, 2006, 2008, 2010, 2015, dan 2017.

Tabel 1. Rangkuman Variabel yang Digunakan

Variabel	Data	Alat Ukur	Skala	Sumber
Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	Skala kuantifikasi jawaban responden ahli	Indeks (1 - 100)	Transparency International Indonesia
Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan	Jumlah Penduduk (000)	Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku	$\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk\ di\ Daerah} \times 100\%$	Rupiah (000)	Badan Pusat Statistik

Sumber: Penulis (2018).

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah gabungan dari data *time series* dan data *cross section* yang disebut sebagai data panel. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode analisis uji korelasi dan uji kausalitas granger.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk menguji keberadaan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen, maupun variabel yang satu dengan variabel lainnya. Hasil analisis korelasi ialah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi

	LN_KORUPSI	LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI	LN_KEMISKINAN
LN_KORUPSI	1,000000	0,243232	-0,220173
LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI	0,243232	1,000000	0,390350**
LN_KEMISKINAN	-0,220173	0,390350**	1,000000

Catatan: ** Korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 1%

Sumber: Data diolah, Eviews 9 dan SPSS (2018).

Berdasarkan tabel hasil analisis diatas menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai r sebesar 0,243232. Artinya, tingkat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi ialah rendah dan tanda (+) menjelaskan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau searah. Tabel hasil diatas juga menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai r sebesar 0,390350. Artinya, tingkat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi ialah rendah dan tanda (+) menjelaskan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau searah. Berdasarkan tabel hasil analisis diatas juga menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara kemiskinan dan korupsi memperoleh nilai r sebesar -0,220173. Artinya, tingkat hubungan antara kemiskinan dan korupsi ialah rendah dan tanda (-) menjelaskan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif atau berlawanan.

Analisis Kausalitas

Uji kausalitas granger digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar variabel yang diamati. Konsep statistik yang digunakan dalam uji kausalitas granger ialah X (suatu kejadian) dikatakan menyebabkan Y (kejadian lain) jika realisasi X terjadi lebih dahulu daripada Y dan realisasi Y tidak terjadi mendahului realisasi X. Kriteria pengujian yang dilakukan ialah apabila *p value* (nilai probabilitas) lebih besar dari *critical value* yang digunakan (0,05), maka H_0 diterima yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas. Sedangkan apabila *p value* (nilai probabilitas) lebih kecil dari *critical value* yang digunakan (0,05), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat hubungan kausalitas.

Tabel 3. Hasil Analisis Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
LN_KORUPSI does not Granger Cause LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI	4.56036	0.0394
LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI does not Granger Cause LN_KORUPSI	2.32593	0.1357
LN_KEMISKINAN does not Granger Cause LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.34262	0.5619
LN_PERTUMBUHAN_EKONOMI does not Granger Cause LN_KEMISKINAN	1.16125	0.2882
LN_KEMISKINAN does not Granger Cause LN_KORUPSI	0.08624	0.7707
LN_KORUPSI does not Granger Cause LN_KEMISKINAN	0.25275	0.6181

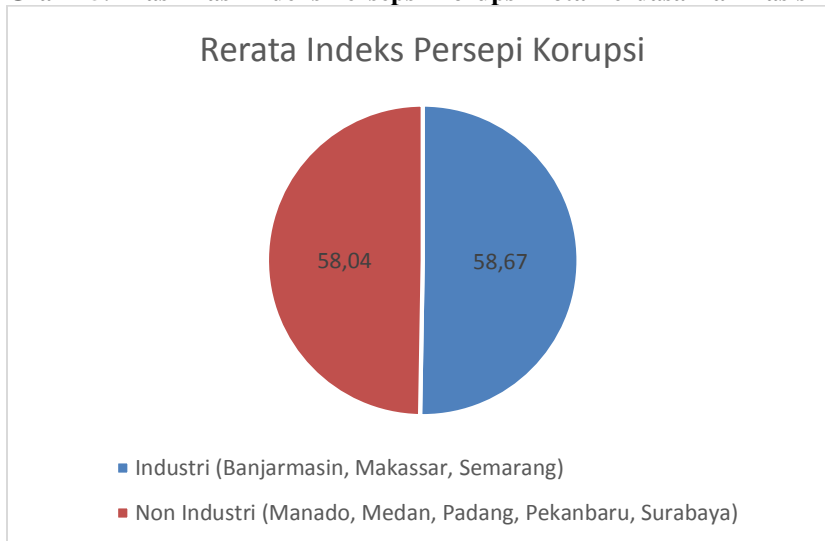
Sumber: Data diolah, Eviews 9 (2018).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa hanya korupsi yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai kritis yang digunakan (0,05), yakni sebesar 0,0394 sehingga H_0 ditolak. Sementara itu, hasil pengujian lainnya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai kritis yang digunakan, sehingga H_0 diterima. Dalam hal ini, hasil pengujian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta tidak terdapat hubungan kausalitas antara kemiskinan dan korupsi.

Pembahasan Hasil Analisis

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Berikut ialah klasifikasi indeks persepsi korupsi, jumlah penduduk miskin, dan PDRB perkapita pada 8 kota berdasarkan basis perekonomian suatu wilayah yang digeneralisasi menjadi sektor industri dan sektor non industri.

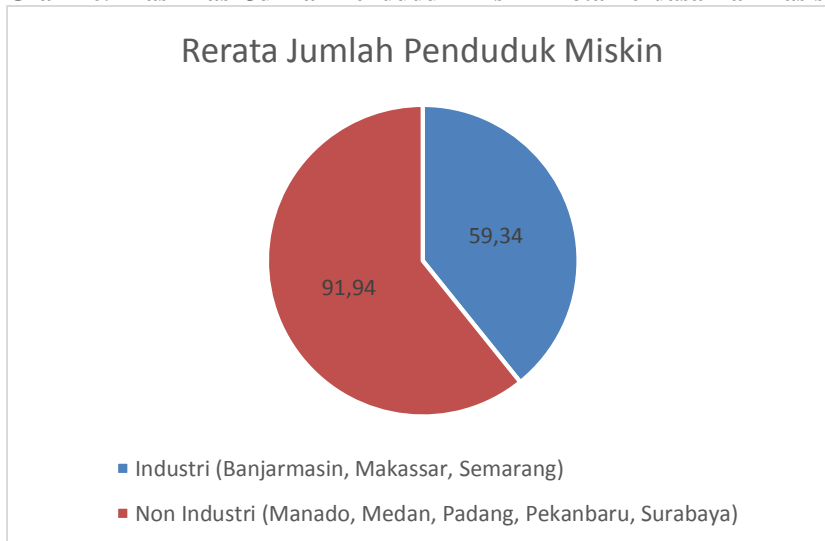
Grafik 5. Klasifikasi Indeks Persepsi Korupsi Kota Berdasarkan Basis Perekonomian Wilayah Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 5 dijelaskan bahwa basis perekonomian wilayah didominasi oleh sektor industri secara relatif daripada sektor non industri, dimana sektor tersebut memiliki rerata indeks persepsi korupsi lebih tinggi, meskipun selisih rerata tersebut hanya sedikit. Dalam hal ini, Kota Banjarmasin, Makassar, dan Semarang relatif memiliki rerata indeks persepsi korupsi lebih tinggi dibandingkan Kota Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Surabaya. Artinya, tindak korupsi yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Makassar, dan Semarang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk dalam basis perekonomian sektor non industri.

Grafik 6. Klasifikasi Jumlah Penduduk Miskin Kota Berdasarkan Basis Perekonomian Wilayah Tahun 2017

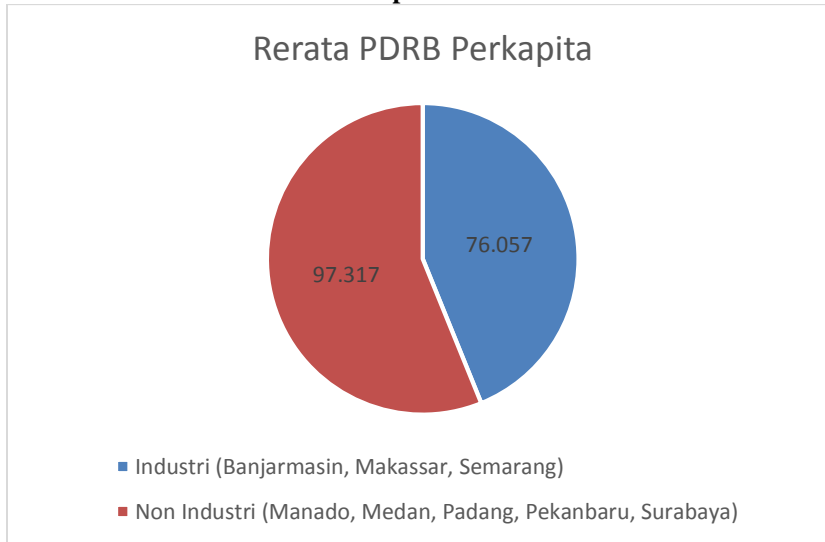


Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Sementara itu, grafik 6 menjelaskan bahwa basis perekonomian wilayah secara relatif didominasi oleh sektor non industri, dimana sektor tersebut memiliki rerata jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan basis perekonomian sektor industri. Dalam hal ini, Kota Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Surabaya relatif memiliki rerata jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Makassar, dan Semarang. Artinya, penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di Kota Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Surabaya relatif lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk dalam basis perekonomian sektor industri. Hal ini juga menjelaskan bahwa basis perekonomian sektor industri memiliki pengaruh lebih

tinggi terhadap pengentasan jumlah penduduk miskin dibandingkan basis perekonomian sektor non industri.

Grafik 7. Klasifikasi PDRB Perkapita Kota Berdasarkan Basis Perekonomian Wilayah Tahun 2017

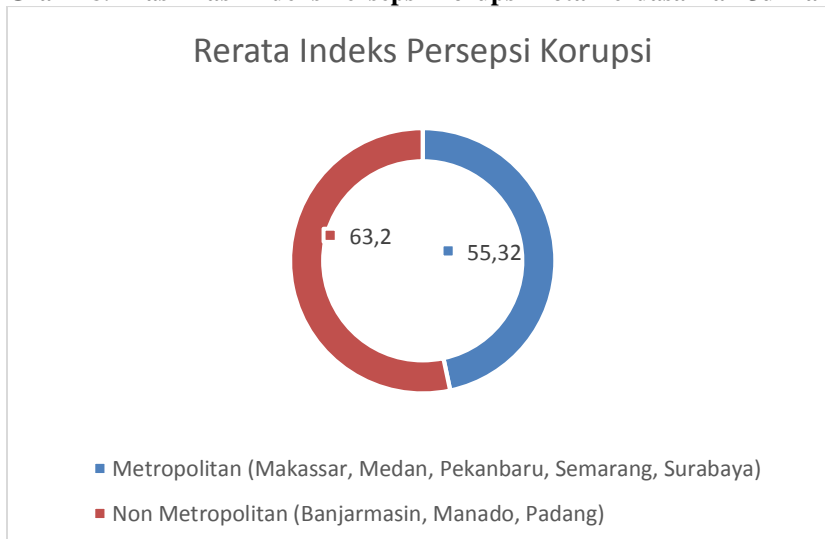


Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 7 dijelaskan bahwa basis perekonomian wilayah secara relatif didominasi oleh sektor non industri, dimana sektor tersebut memiliki rerata PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan basis perekonomian sektor industri. Dalam hal ini, Kota Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Surabaya relatif memiliki rerata PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Makassar, dan Semarang. Artinya, secara agregat tingkat kemakmuran penduduk di Kota Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Surabaya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk dalam basis perekonomian sektor industri. Hal ini juga menjelaskan fakta empiris yang cukup menarik bahwa basis perekonomian sektor non industri memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap besaran PDRB perkapita dibandingkan basis perekonomian sektor industri.

Berikut ialah klasifikasi indeks persepsi korupsi, jumlah penduduk miskin, dan PDRB perkapita pada 8 kota berdasarkan jumlah penduduk yang digeneralisasi menjadi metropolitan dan non metropolitan (dibawah metropolitan).

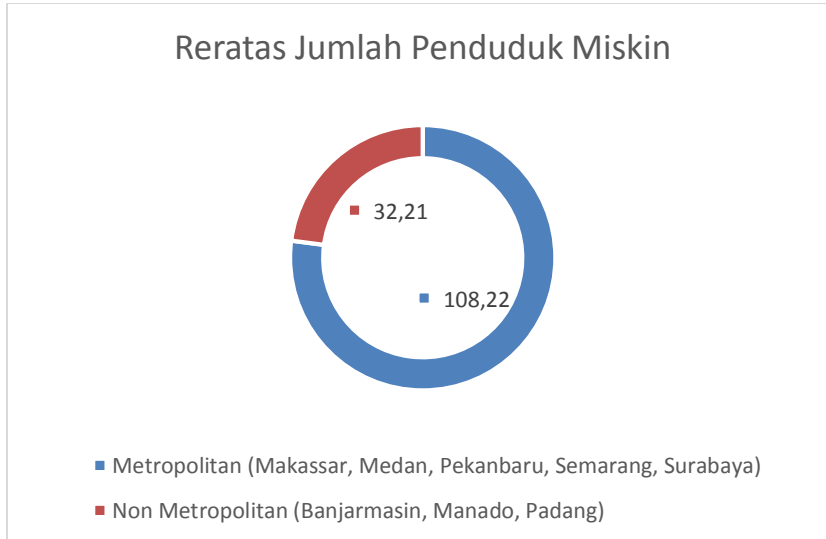
Grafik 8. Klasifikasi Indeks Persepsi Korupsi Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 8 dijelaskan bahwa kota non metropolitan secara relatif mendominasi rerata indeks persepsi korupsi daripada kota metropolitan. Dalam hal ini, Kota Banjarmasin, Manado, dan Padang relatif memiliki rerata indeks persepsi korupsi lebih tinggi dibandingkan Kota Makassar, Medan, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya. Artinya, tindak korupsi yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Manado, dan Padang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk kota metropolitan.

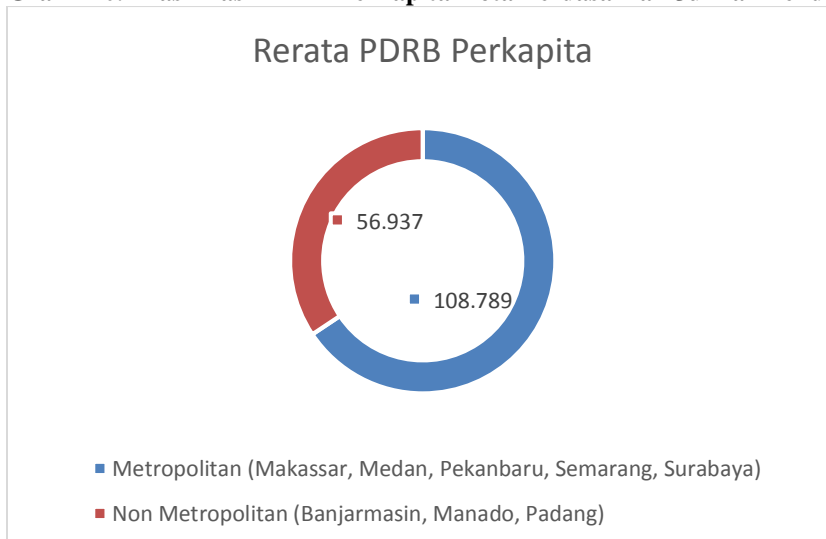
Grafik 9. Klasifikasi Jumlah Penduduk Miskin Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Sementara itu, grafik 9 menjelaskan bahwa kota metropolitan secara relatif mendominasi rerata jumlah penduduk miskin dibandingkan kota non metropolitan. Dalam hal ini, Kota Makassar, Medan, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya relatif memiliki rerata jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Manado, dan Padang. Artinya, penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di Kota Makassar, Medan, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya relatif lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk dalam kota non metropolitan. Hal ini juga menjelaskan bahwa kota non metropolitan memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap pengentasan jumlah penduduk miskin dibandingkan kota metropolitan.

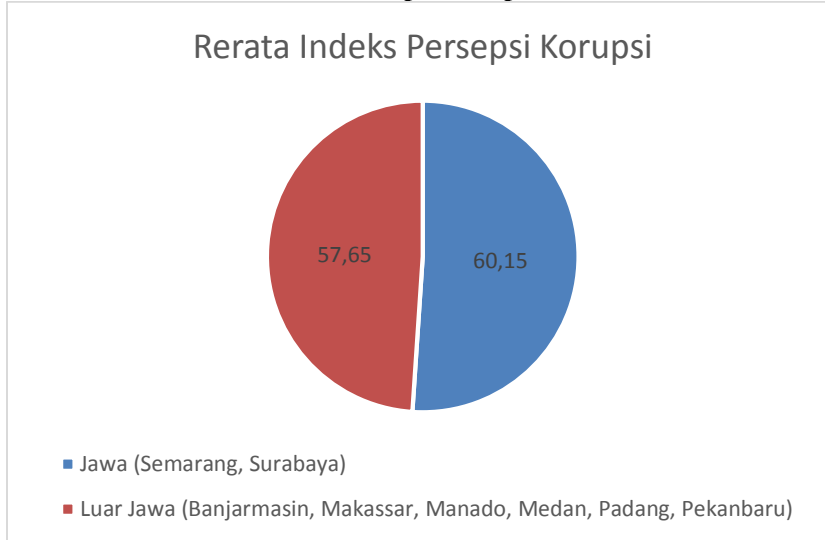
Grafik 10. Klasifikasi PDRB Perkapita Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 10 dijelaskan bahwa kota metropolitan secara relatif mendominasi rerata PDRB perkapita dibandingkan kota non metropolitan. Dalam hal ini, Kota Makassar, Medan, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya relatif memiliki rerata PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Manado, dan Padang. Artinya, secara agregat tingkat kemakmuran penduduk di Kota Makassar, Medan, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota yang termasuk dalam kota non metropolitan. Hal ini juga menjelaskan bahwa kota metropolitan memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap besaran PDRB perkapita dibandingkan kota non metropolitan.

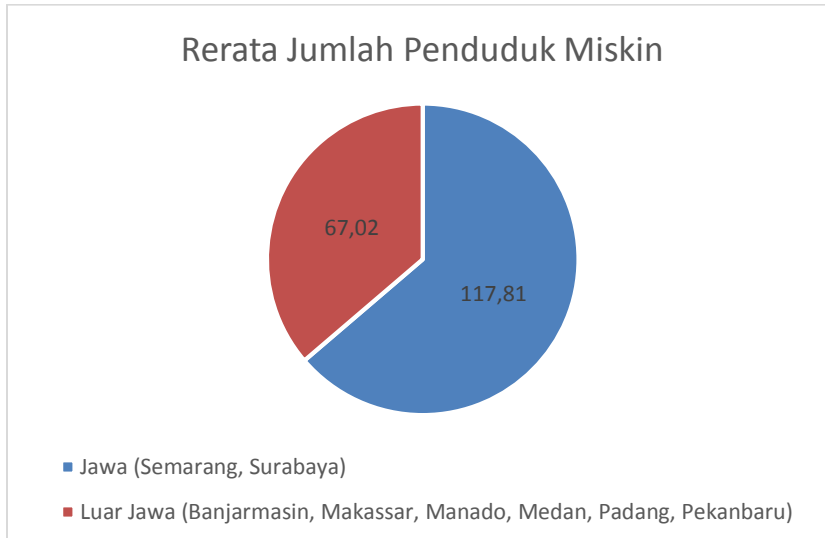
Grafik 11. Klasifikasi Indeks Persepsi Korupsi Kota Berdasarkan Letak Geografis Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 11 dijelaskan bahwa kota di Pulau Jawa secara relatif mendominasi rerata indeks persepsi korupsi daripada kota diluar Pulau Jawa. Dalam hal ini, Kota Semarang dan Surabaya relatif memiliki rerata indeks persepsi korupsi lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Makassar, Manado, Medan, Padang, dan Pekanbaru. Artinya, tindak korupsi yang berlangsung di Kota Semarang dan Surabaya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa kota diluar Pulau Jawa.

Grafik 12. Klasifikasi Jumlah Penduduk Miskin Kota Berdasarkan Letak Geografis Tahun 2017

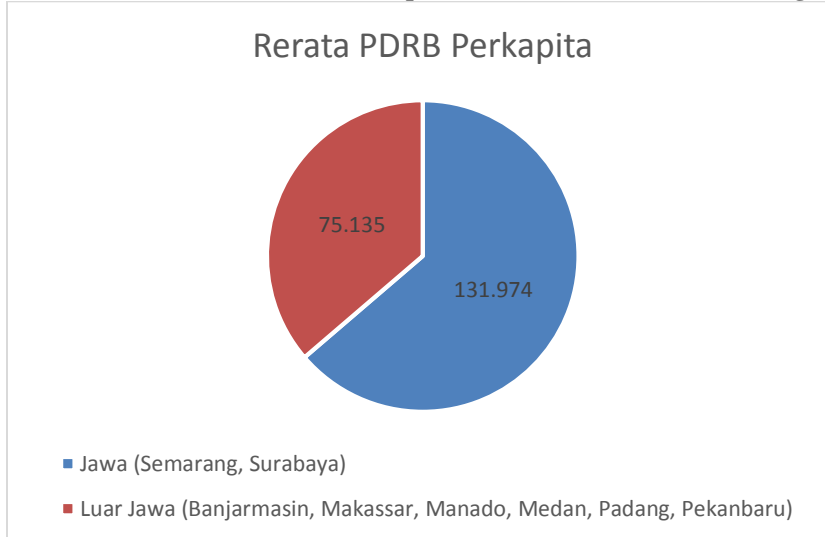


Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Sementara itu, grafik 12 menjelaskan bahwa kota di Pulau Jawa secara relatif mendominasi rerata jumlah penduduk miskin dibandingkan kota diluar Pulau Jawa. Dalam hal ini, Kota Semarang dan Surabaya relatif memiliki rerata jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin,

Makassar, Manado, Medan, Padang, dan Pekanbaru. Artinya, penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di Kota Semarang dan Surabaya relatif lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kota diluar Pulau Jawa. Hal ini juga menjelaskan bahwa kota diluar Pulau Jawa memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap pengentasan jumlah penduduk miskin dibandingkan kota di Pulau Jawa.

Grafik 13. Klasifikasi PDRB Perkapita Kota Berdasarkan Letak Geografis Tahun 2017



Sumber: Data diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan grafik 13 dijelaskan bahwa kota di Pulau Jawa secara relatif mendominasi rerata PDRB perkapita dibandingkan kota diluar Pulau Jawa. Dalam hal ini, Semarang dan Surabaya relatif memiliki rerata PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin, Makassar, Manado, Medan, Padang, dan Pekanbaru. Artinya, secara agregat tingkat kemakmuran penduduk di Kota Semarang dan Surabaya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota diluar Pulau Jawa. Hal ini juga menjelaskan bahwa kota di Pulau Jawa memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap besaran PDRB perkapita dibandingkan kota diluar Pulau Jawa.

Hubungan antara Korupsi dengan Kemiskinan

Hasil analisis kausalitas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan, dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini (hipotesis ditolak). Sementara itu, berdasarkan analisis korelasi menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara korupsi dan kemiskinan ialah rendah dan bersifat negatif. Tidak ada hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan juga menunjukkan bahwa korupsi bukanlah faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, maupun sebaliknya. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda dalam menganalisis hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan, dimana hasilnya ialah terdapat hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan.

Rahayu dan Widodo (2012) menggunakan basis data 9 Negara ASEAN selama periode 2005 – 2009 melalui indeks persepsi korupsi dan indeks pembangunan manusia menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap kemiskinan, atau korupsi menyebabkan kemiskinan. Sementara itu, Bayar *et al.* (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari kemiskinan terhadap korupsi, atau kemiskinan menyebabkan korupsi. Dalam hal ini, kemiskinan menyebabkan korupsi melalui ketimpangan pendapatan, dimana jika kemiskinan meningkat dan kemudian mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, maka korupsi juga akan meningkat. Negin *et al.* (2010) menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara korupsi dan kemiskinan.

Model ekonomi dalam Chetwynd *et al.* (2003) menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan dengan terlebih dahulu mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Artinya,

meningkatnya korupsi secara langsung akan mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya untuk menjalankan bisnis, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan. Dalam hal ini, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan.

Hubungan antara Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis kausalitas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini (hipotesis ditolak). Sementara itu, berdasarkan analisis korelasi menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ialah rendah dan bersifat positif. Tidak ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, maupun sebaliknya. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda dalam menganalisis hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dimana hasilnya ialah terdapat hubungan kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Aimon (2012) menggunakan basis data Negara Indonesia selama periode 1980 – 2009 melalui persentase pertumbuhan ekonomi dan persentase tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara itu, Odhiambo (2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi menyebabkan kemiskinan. Nindi dan Odhiambo (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Bourguignon (2004) menjelaskan bahwa pengurangan kemiskinan dapat melalui perubahan pada pemerataan pendapatan maupun meningkatkan tingkat pendapatan sehingga mendorong pertumbuhan. Artinya, kelompok dengan pendapatan yang rendah akan mendapatkan tambahan pendapatannya melalui redistribusi pendapatan, dan bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga dikategorikan penduduk tidak miskin. Efek pertumbuhan menggambarkan dampak perubahan secara proporsional pada seluruh level pendapatan hingga secara relatif distribusi pendapatan tidak akan berubah. Kemudian, peningkatan tingkat pendapatan harus diselaraskan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi hingga secara rata-rata pendapatan masyarakat akan naik. Kenaikan pendapatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengurangi kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung belum efektif, mengingat berdasarkan setiap tahun periode pengamatan penelitian bahwa PDRB perkapita secara terus menerus meningkat dan diduga selaras dengan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan yang juga meningkat, tetapi justru jumlah penduduk miskin tidak berkurang secara terus-menerus atau bersifat fluktuatif. Dalam hal ini, berdasarkan studi kasus 8 Kota di Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi yang dimiliki ialah tidak berkualitas akibat tidak berhasil menurunkan kemiskinan secara konsisten melalui jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung menekankan pada investasi padat modal, dimana semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi daya tampung bagi tenaga kerja semakin sedikit, sehingga kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kemiskinan meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan hal yang mendukung realitas pertumbuhan ekonomi saat ini yang menekankan pada investasi padat modal, dimana studi kasus pada 8 kota menunjukkan bahwa basis perekonomian sektor industri sebagai representasi investasi padat modal memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap pengentasan jumlah penduduk miskin dibandingkan basis perekonomian sektor non industri sebagai representasi investasi padat karya.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Korupsi

Hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi ialah sesuai dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini (hipotesis diterima). Hal ini selaras dengan penelitian Ajilore & Elumilade (2007) dan Mathew *et al.* (2013) bahwa terdapat

hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, berdasarkan analisis korelasi menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi ialah rendah dan bersifat positif.

Proses korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasi melalui investasi, baik investasi asing maupun investasi domestik. Korupsi akan menghambat investasi, kemudian menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan mengurangi insentif bagi investor asing atau domestik (Chetwynd *et al.*, 2003). Dalam hal ini, keberadaan tindak korupsi oleh pejabat publik, baik pada tataran pusat maupun daerah, akan mempengaruhi biaya tambahan yang perlu dikeluarkan oleh pihak investor (swasta) semakin meningkat guna menyelesaikan masalah birokrasi, dimana bertambahnya biaya tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kerugian pihak investor. Pihak investor cenderung memilih daerah-daerah dengan tingkat korupsi yang rendah dalam kegiatan investasinya maupun pihak investor juga cenderung mengurangi kegiatan investasi yang sedang berlangsung dalam daerah-daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi. Berkurangnya nilai investasi tersebut diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. Hal tersebut akan merugikan daerah akibat berkurangnya investor dalam kegiatan investasi, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya tingkat perekonomian daerah dan mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sementara itu, proses korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dapat diidentifikasi melalui pajak, dimana korupsi akan mengurangi pendapatan daerah dari pajak akibat suatu tindakan korupsi akan berdampak pada perusahaan dan aktivitas produksinya terdorong ke sektor informal, sehingga penerimaan dari pajak akan berkurang (Chetwynd *et al.*, 2003). Dalam hal ini, pajak yang dibayarkan masyarakat kepada daerah pada akhirnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat dalam bentuk lainnya, seperti infrastruktur umum yang baik. Korupsi memiliki pengaruh dalam menurunnya kualitas infrastruktur umum akibat sumber daya publik dialihkan untuk penggunaan pribadi, dimana dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur umum di pemerintah dialihkan untuk aktivitas pencarian rente (Chetwynd *et al.*, 2003). Artinya, adanya korupsi akan berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan daerah dari pajak, dimana salah satu dampak negatif dari hal tersebut ialah kualitas infrastruktur umum yang buruk akibat biaya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur umum secara kuantitas maupun kualitas justru dikorupsi. Apabila kuantitas dan kualitas infrastruktur umum begitu buruk, maka hal tersebut dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta kesejahteraan masyarakat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) diantara keduanya. Sementara itu, tingkat hubungan (korelasi) antara korupsi dan kemiskinan rendah dan bersifat negatif. Hubungan antara korupsi dengan kemiskinan terjadi secara tidak langsung, apabila indeks persepsi menurun (korupsi meningkat) akan berpengaruh terhadap menurunnya investasi dalam perekonomian, menimbulkan inefisiensi, distribusi pendapatan semakin tidak merata, sehingga kemiskinan menjadi meningkat yang direpresentasikan oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin suatu daerah.
2. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) diantara keduanya. Sementara itu, tingkat hubungan (korelasi) antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi rendah dan bersifat positif. Hubungan antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi terjadi secara tidak langsung, apabila produk domestik regional bruto perkapita meningkat, namun diikuti oleh distribusi pendapatan yang semakin tidak merata akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin suatu daerah.
3. Terdapat hubungan kausalitas satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi terjadi secara langsung melalui instrumen investasi. Apabila indeks persepsi korupsi menurun

(korupsi meningkat) akan berpengaruh terhadap terhambatnya investasi, menurunnya insentif bagi investor, meningkatnya biaya produksi, menurunnya kualitas infrastruktur umum, menurunnya produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi menurun yang direpresentasikan oleh menurunnya produk domestik regional bruto perkapita suatu daerah.

Saran

1. Orientasi pembangunan lebih diarahkan pada *pro poor growth* yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kelompok penduduk miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan, dimana pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
2. Upaya memperbaiki kinerja birokrasi perlu ditingkatkan guna mengurangi secara nyata tindak korupsi di birokrasi yang mampu mempengaruhi biaya tambahan pada kegiatan investasi. Setiap entitas pemerintahan perlu meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan nilai-nilai *good governance* dalam penyelenggaraan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
3. Bagi para akademisi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun saran penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya ialah sebagai berikut.
 - a. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan kausalitas antara korupsi dengan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui variabel inflasi dan investasi guna menambah gambaran atas kompleksitas dan realitas suatu permasalahan yang terjadi.
 - b. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode kualitatif guna melihat pengaruh korupsi secara mikro dan terfokus pada suatu daerah penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Aimon, Hasdi. 2012. Produktivitas, Investasi Sumberdaya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. vol 1 no 1. hal 209 – 218.
- Ajilore, O. Taiwo & Elumilade, D.O. 2007. Does Corruption Matter for Nigeria Long Run Growth: Evidence from Cointegration Analyses and Causality Tests?. *The International Journal of Business and Finance Research*. vol 1 no 2. hal 69 – 79.
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 20 Agustus 2018.
- Bayar, Y., Sasmaz, Mahmut U., & Ozturk, Omer F. 2017. Corruption, Income Inequality, and Poverty in Central and Eastern European Union Countries: A Panel Causality Analysis. *Journal of the Human and Social Sciences Researches*. vol 6 no 6. hal 340 – 349.
- Boediono. 2012. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*. Management Systems International, Washington.
- Deininger, Klaus & Olinto, Pedro. 2000. *Asset Distribution, Inequality, and Growth*. Policy Research Working Paper. World Bank.
- Dollar, David & Kraay, Aart. 2001. *Growth is Good for the Poor*. Policy Research Working Paper. World Bank.
- Egunjobi, T. Adenike. 2013. An Econometric Analysis of the Impact of Corruption on Economic Growth in Nigeria. *Journal of Business Management and Economics*. vol 4 no 3. hal 54 – 65.

- Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. 2013. Does Corruption Impede Economic Growth in Pakistan?. *Economic Modelling*. vol 35. hal 622 – 633.
- Franciari, Purwiyanti S. 2013. Analisis Hubungan IPM, Korupsi, dan Kapasitas Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010). *Diponegoro Journal of Economics*. vol 2 no 2. hal 1 – 14.
- Hudiyanto. 2004. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mankiw, N. Gregory, Quah, Euston, & Wilson, Peter. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathew, Rotimi E., Barnabas, O., Lawal, Joseph, Ise O. 2013. Analysis of Corruption and Economic Growth in Nigeria. *Afro Asian Journal of Social Sciences*. vol 4 no 4. hal 1 – 19.
- Negin, V., Rashid, Zakariah, B. A., & Nikopour, Hesam. 2010. *The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis*. Munich Personal RePEc Archive Paper No. 24871.
- Nyasha, S., Gwenhure, Y., & Odhiambo, Nicholas M. 2016. *Poverty and Economic Growth in Ethiopia: A Multivariate Causal Linkage*. UNISA Economic Research Working Paper No. 04.
- Odhiambo, Nicholas M. 2009. Finance-Growth-Poverty Nexus in South Africa: A Dynamic Causality Linkage. *The Journal of Socio-Economics*. no 38. hal 320 – 325.
- Rahayu, Ina P., & Widodo, Tri. 2012. The Causal Relationship between Corruption and Poverty in ASEAN: A General Method of Moments/ Dynamic Panel Data Analysis. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. vol 15 no 3. hal 527 – 536.
- Rumagit, Merry C. N. 2016. *Pro Poor Growth dan Desentralisasi Fiskal dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Kota Sulawesi Utara*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Tanzi, Vito. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. International Monetary Fund Working Paper. vol 45 no 4. hal 559 – 594.
- Transparency International. <https://www.transparency.org>. Diakses pada 20 Agustus 2018.
- Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id>. Diakses pada 20 Agustus 2018.
- Todaro, Micahel P. & Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan oleh: Agus Dharma. 2011. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, S. Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- World Bank. <https://www.worldbank.org>. Diakses pada 20 Agustus 2018.